

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini, tuntutan masyarakat juga semakin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan meningkatnya tuntutan tersebut, dapat mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Mardiana & Fahlevi, 2017). Akuntabilitas diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Struktur pemerintahan daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, dan aset yang terjadi di lingkungan SKPD.

Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai

yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rendahnya kualitas informasi laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang belum diterapkan secara maksimal serta pengawasan yang juga masih lemah (Pujiswara et al., 2014). Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan pada pengaplikasian sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada sistem akuntansi pemerintahan terdapat beberapa ciri penting atau syarat yang diperlukan diantaranya yaitu sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintahan dapat menyediakan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan serta di audit. Selain itu, sistem akuntansi pemerintahan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan program atau evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan (Putra, 2018).

Pemerintah harus mampu memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi untuk mengelola sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang baik agar mudah memberikan laporan keuangan yang baik. Karena, laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lainnya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan. Kertas dan pensil atau perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi (A.Sultoni et al., 2018). Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penggunaan sistem informasi akuntansi

keuangan daerah mulai dari pengelompokan, pengklasifikasian, pencatatan dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah hingga pelaporan keuangan sebagai informasi untuk nantinya digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam setiap proses pengambilan keputusan SKPD (Putu et al., 2014).

Seorang akuntansi yang memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi maka akan semakin tinggi juga kualitas akurasi laporan keuangan yaitu dengan dapat menyelesaikan laporan tepat waktu, menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya, dan dapat membuat keputusan yang tepat (Diani, 2014). Oleh karena itu, tidak hanya mengandalkan teknologi informasi saja tetapi pemahaman akuntansi juga harus di seimbangkan agar laporan keuangan tersebut tetap berkualitas. Sebuah laporan keuangan yang berkualitas juga diperlukan adanya orang yang berkompeten, yang mana kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif agar pelaporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah untuk dipahami. Pada pemerintah, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat. Begitu juga pada bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan yang terkait lainnya (Lestari, 2020).

Dalam menilai kualitas laporan keuangan akan dilakukan terlebih dahulu koreksi oleh pengawas / internal audit apabila terdapat penyimpangan. Oleh karena itu, peran internal audit sangat dibutuhkan dalam mengoreksi sebuah laporan keuangan agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang tepat,

efisien, dan efektif sehingga ketika mengambil keputusan juga akan tepat dan sesuai kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Internal audit ini sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan karena internal audit ini yang akan melakukan pemeriksaan, mengawasi, serta mengevaluasi mengenai kegiatan atau kejadian ekonomi pada organisasi. Setiap peningkatan peran internal audit ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Diani, 2014).

Saat ini kita sedang dihadapkan dengan adanya *Pandemi Covid-19*. Pada tahun 2020, pandemi mulai meningkat dan Kota Surabaya memiliki jumlah tingkat pasien terpapar yang tertinggi kedua setelah Ibukota Jakarta. Dengan adanya pandemi tersebut, apakah kualitas laporan keuangan BPKAD Kota Surabaya mampu mempertahankan kualitasnya atau telah terjadi perubahan terhadap kualitas laporannya. Dikarenakan, seperti yang kita lihat saat ini pada sektor kesehatan sangat banyak mengeluarkan dana yang cukup tinggi untuk mengatasi *Pandemi Covid-19*. Sehingga, hal tersebut apakah berdampak juga pada kualitas laporan keuangan yang mana laporan keuangan juga dapat mengalami perubahan menyesuaikan dengan aktivitas transaksi ekonomi yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD?

3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap internal audit sebagai variabel intervening?
4. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap internal audit sebagai variabel intervening?
5. Apakah internal audit sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening?
7. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap internal audit sebagai variabel intervening.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap internal audit sebagai variabel intervening.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan internal audit sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan tambahan mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sdm terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan internal audit sebagai variabel intervening di BPKAD.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi tambahan pendukung dan dapat juga untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Sebagai informasi tambahan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan membangun pemerintahan daerah yang lebih baik.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, untuk melengkapi persyaratan agar memperoleh gelar sarjana, dan memperluas pengetahuan bagi peneliti.

c. Bagi Universitas

Sebagai tambahan sumber kepustakaan mengenai jurnal akuntansi.